



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Komitmen Pertahankan WTP

**Pemkot Anggarkan
Sertifikat Tanah**

BENGKULU, BE - Penataan seluruh aset milik Pemerintah Kota Bengkulu mulai

ditindaklanjuti serius. Pemkot melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota akan memploting anggaran khusus untuk pembuatan sertifikat aset tanah. Hal ini terungkap dalam kegiatan optimalisasi peran

OPD dalam pelaporan yang cepat akuntabel sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan opini WTP di Hotel Pasir Putih Resort, kemarin (15/10).

► *Baca Komitmen ..Hal 17*

"Aset khususnya tanah di tahun 2020 kita berencana menganggarkan untuk mensertifikatkan seluruh tanah yang milik pemkot, sehingga kasus sengketa lahan seperti SDN 62 tidak terulang lagi," kata Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Ir Arif Gunadi.

Untuk mengetahui anggaran tersebut, pihaknya meminta seluruh OPD bergerak cepat mendata seluruh aset tanah dari hibah masyarakat atau tanah milik pemkot yang belum ada dokumen resmi.

Sehingga bisa mengetahui berapa total tanah yang harus disertifikatkan dan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan.

"Maka dari sekarang kita minta OPD mendata seluruh aset termasuk tanah mana yang sudah bersertifikat mana yang sudah, insyallah semua tanah di tahun 2020 sudah bersertifikat," ungkapnya.

Sementara itu, Walikota H Helmi Hasan SE yang membuka langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pendataan ini sangat penting, karena sudah banyak kasus yang pada akhirnya menyulitkan pemkot karena lemahnya pengelolaan dokumen kepemilikan aset.

"Ini langkah memantapkan sistem pelaporan dan

pengelolaan aset, karena salah satu komponen untuk mendapat WTP adalah aset, maka ini sangat penting agar kita dapat WTP kembali tahun ini," kata Helmi Hasan.

Menurutnya, WTP sangat penting untuk diperjuangkan setiap tahunnya karena ada manfaat besar salah satunya adalah pemerintah pusat memberikan reward/ penghargaan berupa tambahan dana sekitar Rp 47 milyar.

Dan dana ini sangat dibutuhkan pemkot untuk menunjang pembangunan di tengah minimnya APBD Kota Bengkulu.

"Kita sudah pernah dapat

dana itu, dan ini menjadi solusi bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat sebelum terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota dulu," papar Helmi.

Walikota juga memastikan kepada seluruh ASN bahwa pentingnya pengelolaan aset ini agar sistem pelaporan keuangan itu tidak terjadi masalah dikemudian hari.

"Karena untuk memastikan OPD berjalan sesuai dengan aturan itu, maka memang harus ada pelatihan sehingga track itu menjadi benar dan searah dengan aturan berlaku," pungkas Helmi. (805)